

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

EKOLOGI POLITIK DAN DINAMIKA SOSIO-EKONOMI DI DATARAN TINGGI KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH

(POLITICAL ECOLOGY AND SOCIO-ECONOMY DYNAMICS IN UPLAND PEMALANG DISTRICT, CENTRAL JAVA)

Nur Rosyid*)

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis: nur.rosyid@mail.ugm.ac.id

Abstract

This paper explain the role of state in ecological aspects in the forming of socio economic dynamics in upland Pemalang District, especially in migration dynamic, the expansion and constriction of labours, and their negotiation to the ecological changes. So far, many scholars set out the demographic problems by the issues of poverty, inequality resources, increase of population, labour surplus, and so on. This causal explanation was lack in question on what kind of possibilities force those problems happened. The research has been done in the upland of Watukumpul, Pemalang, Central Java, try to understand how the upland demographical dynamics situated by political-economic and ecological forces. This area is suitable because of vast spreading in changing of farming system: from rice and glagah cultivation to cash crop of Albasia through the reforestation programs and Green campaign. By using quantitative and qualitative method and political ecology approaches. I assume that the ecological changes are forced and situated by political economic state interventions through policies and environmental condition which both farmer and state negotiation be possible. The result show, there was a changing to develop the new rural economic (new plantation) and migration pattern as a part of farmer strategies concerning to the economic opportunities and state intervention through reforestation programs. These choices imply to the changing of farmer's daily routines and their household production.

Keyword: Demography, Political Ecology, Economic and Environmental Change, Farmer Strategies, Migration Pattern

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan peran Negara di sektor ekologi dalam membentuk dinamika sosial ekonomi dataran tinggi Kabupaten Pemalang, khususnya dinamika migrasi, penyempitan and perluasan sektor pekerjaan, dan negosiasinya dengan perubahan ekologi. Selama ini, studi mengenai permasalahan kependudukan berangkat dari isu kemiskinan, ketimpangan sumber daya, lonjakan populasi, dan surplus tenaga kerja, cenderung menganalisis dari sisi hubungan kausalitas. Penjelasan kausalitas ini mempunyai kelemahan dalam menjawab apa yang memungkinkan kondisi tersebut dapat terjadi. Penelitian yang dilakukan di dataran tinggi Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah, mencoba memahami bagaimana dinamika kependudukan dataran tinggi disituasikan oleh kekuatan ekonomi politik dan kondisi ekologis. Permasalahan di daerah tersebut cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut karena ada praktik pengubahan jenis tanaman produksi dalam waktu yang relatif singkat: dari tanaman glagah dan padi ke tanaman Albasia yang cukup masif melalui program penanaman pohon dan kampanye penghijauan. Metode penelitian adalah kombinasi kuantitatif berdasarkan data sekunder dan kualitatif serta menggunakan pendekatan ekologi politik. Terdapat asumsi bahwa perubahan ekologi yang terjadi bukan dikarenakan rasionalitas penduduk setempat saja, melainkan ada intervensi politik-ekonomi negara melalui kebijakannya, serta kondisi lingkungan yang memungkinkan kedua itu bisa berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perubahan strategi petani dalam mengembangkan produksi tanaman barunya dan pola-pola migrasi sebagai bagian dari siasat membaca peluang-peluang ekonomi. Pilihan ini berimplikasi terhadap perubahan rutinitas dan keseharian pola produksi di tingkat keluarga petani.

Kata Kunci: Kependudukan, Ekologi Politik, Perubahan Ekonomi dan Lingkungan, Strategi Petani, Pola Migrasi

STUDI DATARAN TINGGI DAN UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Tema kependudukan yang hendak dibahas di dalam tulisan ini berangkat dari persoalan ekologi dan ekonomi-politik. Berbagai studi kependudukan pada umumnya berangkat dari perubahan kuantitas demografi yang kemudian diarahkan untuk mencari sebab-musabab (probabilitas kausal) terjadinya perubahan tersebut. Banyak pustaka demografi mengangkat masalah-masalah dampak migrasi (Singarimbun, 1996; Khoo, Platt, Sukamdi. 2015) akibat kondisi pedesaan, seperti kemiskinan dataran tinggi (Li [eds], 2002); rendahnya pemasukan (Manning, 2005) lonjakan populasi (Firman, 2015) maupun masalah krisis yang luas pada aspek lingkungan, ekonomi dan demografi (de Haan, 1999). Migrasi pun dipahami sebagai strategi mengatasi kemiskinan (lihat Khotari, 2002; Ellis, 2003). Contoh-contoh kajian tersebut terlalu menyederhanakan persoalan-persoalan kependudukan tanpa melihat bagaimana dampak dan penyebab tersebut disituasikan dan dikondisikan oleh kekuatan-kekuatan politik-ekonomi dan situasi ekologi-geografis.

Persoalan intervensi politik-ekonomi mengenai ekologi bisa berimbas ke permasalahan yang luas seperti isu-isu kependudukan. Artinya, dinamika kependudukan harus dibaca dan dipahami dari berbagai sudut dan konteks yang luas. Pokok persoalan yang hendak saya angkat dalam tulisan ini ialah studi dataran tinggi dan konteks perubahan ekologi dan sektor ekonomi akibat intervensi dari luar dan bagaimana masyarakat setempat bernegosiasi dan berstrategi terhadap intervensi tersebut.

Program-program peningkatan kesejahteraan (pembangunan) di pedesaan seringkali menyangkut perbincangan mengenai peningkatan produksi pertanian, termasuk tanaman pangan. Permasalahan kerentanan pangan misal, tampak krusial yang dapat kita lihat dari kasus malnutrisi atau kasus kematian akibat kelaparan yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan pemberitaan di harian Kompas, angka anak di bawah lima tahun tidak terpelihara di Indonesia, telah meningkat dari 1,8 juta pada tahun 2005 sampai ke angka 2,3 juta pada tahun 2006. Angka ini memperlihatkan persoalan pangan di Indonesia menjadi isu paling penting dan harus segera dicarikan solusinya¹.

Salah satu isu besar yang dicanangkan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional ialah peningkatan produksi tanaman pangan. Isu ini direspon oleh Kementerian Pertanian dengan dicanangkannya program P2BN (Peningkatan Produksi Beras Nasional). Program tersebut menarget surplus beras nasional pada tahun 2014 sebesar 10 juta ton². Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil inisiatif untuk mendukung program tersebut dengan menetapkan sasaran produksi padi sebanyak 10.534.958 ton. Jumlah ini akan ditarget dengan luas lahan 1.797.671 ha dan produktivitas sebanyak 58,60 kwintal per hektar³. Rencana tersebut dijalankan melalui berbagai upaya, antara lain: meningkatkan produktivitas, melakukan perluasan dan pengelolaan lahan, menurunkan konsumsi beras, menyempurnakan manajemen, dan dukungan kebijakan dan regulasi dari kementerian maupun lembaga lainnya⁴. Berdasarkan laporan Jhantami, upaya peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya beras, menemui beragam kendala. Produksi beras pada tahun 1990-an yang mencapai 3,52% dari dekade sebelumnya, terus mengalami penurunan sebesar 1,04 % per tahun. Tidak adanya peningkatan signifikan ini, dikarenakan tingkat produktivitas hanya mencapai 0,05 % per tahun⁵.

Penurunan ini, berdasarkan penelitian Surono, mulai terjadi secara tajam semenjak krisis ekonomi tahun 2007⁶. Pada tahun tersebut, penurunan angka produktivitas beras mencapai 3,4% dan di tahun 2008 mencapai 4,6 %. Tidakkah jumlah tersebut menjadi permasalahan krusial dalam ketahanan pangan nasional kita? Surono berasumsi hal ini disebabkan oleh gejala alam, yakni gejala El Nino yang menyerang Indonesia waktu itu. Pengaruh lainnya yaitu: dampak penggunaan pestisida atau obat-obatan tanaman, fluktuasi iklim dan bencana alam, dan kemerosotan basis sumber daya alam.

² Lihat <http://ditjen.deptan.go.id/index.php/lokasi/452-target-surplus-beras-10-juta-ton-optimis-tercapai-pada-2014>, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.25 WIB.

³ Lihat http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=26783, diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 01.28 WIB.

⁴ ditjen.deptan.go.id, ibid

⁵ Lihat Swastika dkk, dalam Jhantami, *Putting Food First: Toward community-based food security system in Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press. 2008. hlm: 29

⁶ Lihat Surono, "48 anak kekurangan gizi di Jawa Tengah meninggal dunia; Indonesian Nutrition Network [online]; diakses dari: <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1126761128,15743>; diunduh pada tanggal 14 Juni 2012 pukul 02:53

¹ Lihat harian Kompas, "Malnutrisi, Sebuah Keteledoren Bangsa". 7 Oktober 2006

Akan tetapi, Jhamtani tidak sepenuhnya setuju dengan melihat aspek ekologi di atas sebagai faktor yang mempengaruhi penurunan. Dalam studinya mengenai sekuritas dan insekuritas kebijakan tanaman pangan di Indonesia, dia memberikan kerangka kontekstualisasi permasalahan, meliputi: manajemen sumber daya alam, pembangunan desa, dan perdagangan. Ia berpendapat,

*“A discussion on food security (or insecurity) in Indonesia would be meaningless without analysis on the situation of rice, the most important and most commonly eaten staple food. Rice is consumed by 90% of the population and such rice production, distribution, and consumption is a complex issue in with socio-economic and political dimensions. Most cases of food insecurity, particularly in the past, was indicated by rice availability and consumption, and responded to through providing food aid in the form of rice”*⁷.

Pernyataan ini mengindikasikan, persoalan tanaman pangan bukan melulu masalah ekologis, tetapi juga merujuk pada permasalahan ekonomi politik.

Menariknya, dari angka 10 juta ton tersebut, Jawa Tengah menyuplai cadangan Beras Nasional sebesar 57%. Padahal faktanya, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling signifikan, didapati kasus alih fungsi lahan yang cukup masif. Selama tahun 2005, terdapat 13.449 kasus, khususnya di daerah gersang dan terdeforestasi. Artinya, penurunan produksi tanaman pangan di Jawa Tengah di sebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah mengindikasikan alih fungsi ini disebabkan karena ekspansi pembangunan gedung, perumahan, maupun bangunan fisik lain⁸.

Saya berasumsi, penurunan produksi tanaman pangan di Jawa Tengah, tidak selamanya disebabkan oleh ekspansi pembangunan fisik. Jika didalam laporan di atas disebutkan, alih fungsi ini terjadi terutama di daerah gersang dan terdeforestasi, maka dataran tinggi merupakan wilayah yang perlu disorot lebih lanjut. Apalagi selama ini, dataran tinggi seringkali

mengalami praktik-praktik peminggiran. Sebagaimana disebutkan oleh Tania Li, masyarakat dataran tinggi justru telah terbentuk sebagai wilayah yang tersisih melalui perjalanan sejarah keterlibatan politik, ekonomi, dan sosial dengan daerah dataran rendah, yang sudah lama dan masih terus berlangsung⁹. Poffenberger sepakat dengan pandangan ini. Menurutnya, “karena alasan praktis dan politis, penduduk di dataran tinggi di Asia Tenggara masih tidak banyak mendapatkan perhatian”¹⁰. Ketersisihan ini pada akhirnya menyebabkan masyarakat pegunungan dan masyarakat pedalaman, identik dengan masyarakat terisolir. Padahal menurut Colombijn¹¹, pusat-pusat konsentrasi penduduk Indonesia pada masa prakolonial bukanlah di daerah pesisir, melainkan di daerah pedalaman, khususnya di lembah-lembah dan dataran tinggi pegunungan.

Oleh karena itu, dataran tinggi perlu mendapat perhatian lebih lanjut sebagai bagian dari studi dinamika kependudukan, kontestasi ekologi, dan wilayah studi ekonomi-politik. Dengan demikian, paradigma ekologi-politik, sangat relevan dipakai dalam studi ini.

EKOLOGI POLITIK SEBAGAI PENDEKATAN

Pendekatan Ekologi-Politik berkembang dalam cabang Antropologi Ekologi¹². Pendekatan ini sebagai salah satu paradigma dalam Antropologi Ekologi, mulai berkembang sejak permasalahan degradasi lingkungan akibat deforestasi di berbagai wilayah dunia semakin meningkat. Pendekatan ini dikembangkan oleh beberapa pakar lingkungan seperti Peterson (2000), Bryant (1992), Baikie dan Brookfield (1987), Abe-Ken-Ichi (2003). Pendekatan Ekologi Politik, oleh Peterson, merupakan salah satu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan (Ekologi Budaya) dengan Politik Ekonomi dan dinamika antara lingkungan dengan manusia: antara kelompok bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu-lokal kepada transnasional secara keseluruhan¹³.

⁹ Tania Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002

¹⁰ Poffenberger 1990, hlm: xxi, dalam Tania Li. 2002. *Ibid*, hlm:xv

¹¹ Tania Li, dikutip dari Anthony Reid. 1988. *Ibid*, hlm

¹² Benyamin Orlove mendefinisikan disiplin Antropologi Ekologi sebagai studi tentang relasi dinamika kependudukan, organisasi sosial, pola-pola kultural manusia, dan lingkungan dimana mereka tinggal. Lihat Benyamin Orlove. “Ecological Anthropology” dalam *Annual Review of Anthropology IX*. Tahun 1980. hlm: 235-6

¹³ Peterson. 2002, dalam Herman Hidayat, John Haba, & Robert Sibirian (eds) (2011). *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman*

⁷ Jhamtani, *ibid*:28

⁸ Mengenai alih fungsi lahan sawah bisa dilihat di <http://www.pekalongankab.go.id/fasilitas-web/artikel/pertanian/2220-target-surplus-beras-10-juta-terkendala-alih-fungsi-lahan-pertanian.html>, diunduh pada tanggal 14 juni 2012 pukul 02.40 WIB

Asumsi dari pendekatan ini, berdasarkan pandangan Naess, pemberlakuan manusia dilihat sebagai nilai paling penting dalam melihat degradasi lingkungan¹⁴. Paradigma ini lahir dari kritik terhadap studi ahli lingkungan yang melihat kerusakan alam akibat ulah penduduk setempat sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan itu¹⁵; maupun akibat dari aktivitas ekonomi yang semakin bebas, meningkatnya investasi secara global, sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab menangani persoalan ini¹⁶.

Konsep di atas, dipersempit oleh Sinead Bailey dalam bukunya, *Third World Political Ecology* pada tahun 1997. Melalui buku itu, dia mencoba memberikan arah bagaimana pandangan Pett dan Watts di atas, digunakan dalam memahami proses-proses perubahan ekologi di Dunia Ketiga. Menurutnya, seorang ekolog politik harus melihat perubahan lingkungan Dunia Ketiga dan konflik dalam terma problem lingkungan (permasalahan ekologi), konsep pembangunan berkelanjutan, karakteristik sosial ekonomi, aktor-aktor (negara dan pasar), serta wilayah khusus¹⁷. Bailey sudah memberikan arah, bagaimana perubahan lingkungan secara politis tersebut dapat dipahami. Menurutnya, pendekatan ini berawal dari penjelasan bagaimana perubahan lingkungan tersebut bisa berlangsung. Selanjutnya, perubahan itu direlasikan dengan proses-proses politik ekonomi¹⁸.

Kerangka tersebut saya gunakan untuk memahami fenomena kependudukan kaitannya dengan perubahan ekologi, negosiasi, dan strategi petani terhadap intervensi dari luar. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Watukumpul, Pemalang selama pertengahan bulan Januari hingga pertengahan Februari 2012. Penelitian ini merupakan program Jurusan Antropologi UGM untuk memahami pertumbuhan ekonomi baru di wilayah dataran tinggi Jawa: Dieng, Pekalongan, dan Pemalang. Tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Producing Wealth and Poverty in Indonesia's New Rurals

Economics" kerjasama Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada dengan University of Toronto, Kanada¹⁹.

INTRODUKSI TANAMAN ALBASIA DI WATUKUMPUL DAN KONVERSI LAHAN

Watukumpul merupakan daerah yang berbantuan. Hampir di tiap ruas petak rumah, terdapat batu-batu besar yang mencuat. Secara demografis, penduduk desa Watukumpul berjumlah 4.994 jiwa: terdiri dari 2.475 jiwa laki-laki dan 2.519 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatannya mencapai 884 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Desa Watukumpul pada tahun 2011 sebesar 1,01 %. Jumlah tersebut terdistribusi berdasarkan umur: 643 jiwa (0-5 tahun), 1.338 jiwa (6-20 tahun), 2.659 jiwa (21-60), dan 354 jiwa (60 tahun keatas).

Kondisi topografi wilayah Watukumpul terdiri dari daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 450-800 meter di atas permukaan air laut. Wilayah desa Watukumpul merupakan daerah yang berbukit-bukit, baik yang memiliki kemiringan landai dan curam. Jenis tanah di Wilayah Desa Watukumpul terdiri dari tanah regosol batu-batuan pasir dan intermedier dan tanah latosol yang terdiri dari batu bekuan pasir²⁰.

Masyarakat Watukumpul mengembangkan strategi pertanian sawah tadah hujan; menanam glagah (*Saccharum spontaneum*), nilam (*Pogostemon sp.*), dan cengkih (*Syzygium aromaticum*). Bahkan ada petani yang menanam palawija di wilayah Hutan Negara. Tanaman produktif terakhir yang dikembangkan di sana adalah albasia (*Albizia falcataria*). Beragamnya strategi yang dikembangkan ini, dapat dipahami dalam konteks sejarahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tania Murray Li, Pola perubahan ekologi berjalan bersama-sama dengan interaksi masyarakat terhadap lingkungannya. Proses ini tidak dapat dipahami dengan baik kecuali dalam hubungannya dengan sejarah kontak (langsung atau tidak) antara masa kolonial, pemerintah Orde Baru, orang-orang kota, pedagang, dan penduduk yang bermigrasi²¹.

Nasional Era Otda (edisi ke-1, cetakan ke-1). Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia. 2011, hlm: 8

¹⁴ Naess (1987) dalam Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge. 1996, hlm: 23-24

¹⁵ Lihat juga Grossman. *The Political Ecology of Bananas: Contract Farming, Peasants, and Agrarian Change in Eastern Caribbean*. University of North Carolina Press. tahun 1997

¹⁶ Lihat Richard Peet dan Watt. *Ibid*: 24

¹⁷ Lihat Sinead Bailey "Introduction", dalam *Third World Political Ecology*. 1997 hal: 1

¹⁸ Bailey, *ibid*: 27-28

¹⁹ Program ini diprakarsai oleh Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono dari Antropologi UGM bekerjasama dengan Prof. Tania Murray Li dari University of Toronto. Informasi lebih mengenai program kerjasama penelitian ini dapat diakses di www.ruraleconomics.fib.ugm.ac.id

²⁰ Data demografis Watukumpul diambil dari buku Laporan Penyelenggaraan Desa Watukumpul yang disusun pada tahun 2011. Saya menggunakan data ini atas seijin Sekretaris Desa setempat.

²¹ *Ibid* :xxii

Proses introduksi tanaman albasia dan pinus di Watukumpul dilakukan dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan teologis dimana nilai-nilai agama menjadi bagian dari advokasi. Eri, salah seorang pegiat Kebun Bibit Rakyat, menjelaskan, orang-orang Watukumpul harus disadarkan untuk menanam pohon. *“Mengurus makhluk yang bernyawa itu merupakan urusan berat kepada Tuhan, manusia tidak boleh seenaknya. Berat lho itu mas, beda kalau suruh buat jembatan atau mbenahi jalan, lha ini urusannya sama Yang Kuasa, kalau sampai mati akhirat mau gimana...?”* terangnya²². Seorang kepala desa dalam sosialisasi berbarengan dengan Musrenbang Desa menekankan pembicaraannya, *“Silahkan pohon itu nanti ditanam, pohon itu ibarat anak kecil, kalau tidak kita sayangi, tidak kita rawat, besok kita tidak akan menikmati hasilnya”*. Introduksi penanaman pohon sebagai agenda dunia dalam menangani pemanasan global, tidak dilakukan dengan kerangka pemikiran akademis. Alasan dan tujuan penanaman pohon albasia tersebut diintroduksi sesuai nalar masyarakat setempat. Secara politis, introduksi semacam ini menjadi strategi mempercepat penerimaan masyarakat setempat terhadap tanaman baru.

Introduksi tanaman produktif di Watukumpul dimulai melalui penanaman pohon pinus dan glagah. Berdasarkan data lapangan, pada tahun 2010 penduduk setempat mendapatkan bantuan pohon pinus dari dinas provinsi sebanyak 10.000 batang, dimana tiap KK mendapatkan 25 batang. Selain itu, desa Watukumpul lewat program KBR tahun 2010 mendapatkan pinus sebanyak 2000 batang dari 60.000 batang yang diproduksi. Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk setempat dengan jumlah 50 batang/KK. Jumlah ini untuk ditanam di lahan penduduk cukup besar.

Berdasarkan penelitian Nugroho Priyono²³, Penanaman pinus di Jawa yang dimulai pada tahun 1970-an dimaksudkan untuk mereboisasi hutan gundul, selain disamping sebagai pemasok kebutuhan bakan baku kayu untuk industri kertas. Kualitas kayu pinus dinilai sangat cocok karena serat dan warnanya yang bagus. Selain pohon pinus, warga setempat juga mengembangkan pertanian glagah untuk mendukung keberlanjutan industri sapu yang berkembang sejak tahun 1990-an. Ada juga pohon nilam yang ditanam

untuk industri suling minyak. Pernah suatu ketika pak J bercerita kalau pernah punya lahan glagah 3,5 hektar. Dia menanam nilam ini karena melihat pangsa pasar begitu menjanjikan, yang biasanya 250 ribu per liternya. Akan tetapi pernah mencapai 1,25 juta rupiah. Melihat hal ini, ia menebang separuh glagahnya dan menggantinya dengan nilam. Dia juga bercerita kalau nilam waktu menjanjikan itu, pernah ada seorang juragan yang punya uang Rp 25.000.000. Meskipun hanya meminjam, uang sebesar itu dipakai untuk bisnis nilam. Biasanya dia membeli dari petani seharga biasa. Akan tetapi terus ditimbun menunggu harga tinggi. Sehingga sewaktu harga mencapai 1,2 juta itu dia bisa untung 500%nya. Sehingga dia bisa mengembalikan lebih dari uang yang ia pinjam²⁴.

Gambaran sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan dua hal penting mengenai bagaimana masyarakat ‘membaca’ peluang-peluang baru. Pertama, pergantian tanaman yang dilakukan oleh penduduk setempat tidak dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagian dan perlu percobaan. Pilihan ini tentu saja muncul atas intervensi wali masyarakat (pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan program KBR (Kebun Bibit Rakyat) maupun NGO seperti BCL (Banowati Cinta Lingkungan) sebagai program dominan pengembangan ekologi beberapa tahun terakhir. Kedua, perubahan tanaman ini dipengaruhi oleh kondisi pangsa pasar: prospektif atau tidak. Masyarakat mendasarkan keputusannya atas pertimbangan seberapa besar permintaan pasar yang terlihat pada besar kecilnya harga.

Hal yang sama juga terjadi dengan penanaman albasia. Berdasarkan keterangan seorang pengelola hutan rakyat, jenis pohon ini belum bisa ditentukan kapan awalnya berkembang di sini. Saya mengira, introduksi albasia dibawa oleh pedagang pedagang sapu atau pedagang luar. Kemudian di tahun 2010 didirikan empat tempat KBR (Kebun Bibit Rakyat) di empat desa sebagai program pembibitan secara mandiri. Empat desa tersebut meliputi: Watukumpul, Majakerta, Medayu dan Tundagan. Pelaksanaannya dibantu oleh Bank BRI. Pendirian KBR ini, berdasarkan keterangan salah satu elit setempat, yakni “untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar bisa membuat bibit sendiri”. Menurutnya, selama ini masyarakat masih membeli bibit albasia dari pedagang-pedagang keliling yang berasal dari daerah lain.

Ada berbagai informasi mengenai pembagian bibit albasia di Watukumpul ini. Pertama program KBR

²² Catatan lapangan tanggal 28 Januari 2012

²³ Lihat Priyono, C. Nugroho. “Hutan Pinus dan Hasil Air” pdf format, 2002. Diunduh dari www.scribd.com/doc/770715/Hutan-pinus-dan-hasil-air pada tanggal 10 april 2012 pukul 03.00 WIB.

²⁴ Catatan lapangan tanggal 29 Januari 2012

pada tahun 2010 dan 2011, melalui program ini, masyarakat mendapatkan jatah bibit gratis rata-rata 100 batang. Semuanya berjumlah 106 petani yang mendapatkan. Akan tetapi ada beberapa yang mendapat lebih, yakni 150, 200, dan bahkan 300. Ada 5 orang yang mendapat jatah 300. Selain itu ada dua orang yang mendapatkan 250 batang. Semua bibit yang dibagikan tidak mencapai 20.000, akan tetapi ketika saya rekap, semuanya hanya 18.600 batang. 400 batang rusak.

Selain KBR, ada program dari BRI bernama 'Peduli Kasih'. Program yang berjalan pada tahun 2011 ini berbentuk pemberian bibit albasia gratis kepada petani sebanyak 3.000 batang. Penanaman albasia ini juga disediakan biaya perawatan. Artinya petani mendapat uang dari keikutsertaannya dalam penanaman tersebut. Instansi kecamatan lain juga ikut membantu bantuan bibit pohon sejumlah 7.500 batang seperti dari Dinas Pertanian, Perhutani, dan kecamatan ditambah Koramil.

Menggemanya isu penanaman pohon di daerah Watukumpul tidak lepas dari banyak faktor yang ikut berpengaruh. Perlu di catat, gema tanam albasia tidak hanya atas pertimbangan otonom petani melihat prospek pasar. Penanaman ini pada mulanya digunakan untuk menanggulangi seringnya longsor di daerah tersebut²⁵. Pemerintah setempat merespon kasus tersebut dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Program ini dijalankan dengan pengajuan penduduk setempat bekerja sama dengan pemerintah desa, dimana lahan-lahan atau lereng yang kritis disarankan untuk ditanami albasia²⁶. Bibit-bibit tersebut diberikan secara cuma-cuma dan boleh di panen jika layak tebang: sistem 'tebang pilih'. Maksudnya, penduduk yang menebang satu pohon, diwajibkan untuk menggantinya dengan lima atau sepuluh bibit baru²⁷. Tidak hanya itu

saja, melalui penanaman pohon ini, jelas pemerintah mempunyai kepentingan dalam menanggapi isu perubahan iklim dan perdagangan karbon. Dalam perspektif pemerintah, sistem ini memungkinkan upaya reforestasi hutan terus berlangsung dan tetap terjaga. Dengan demikian, intervensi terhadap preferensi masyarakat terhadap peluang-peluang ekonomi berangkat dari kondisi-kondisi ekologis seperti ini.

Di samping itu, masifnya penanaman albasia juga tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Hutan Pinus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nugroho Priyono di atas, penanaman pinus pada mulanya dimaksudkan sebagai pemasok kayu. Saya melihat ternyata rencana ini tidak dijalankan dengan semestinya. Pinus di sekitar Watukumpul tidak lagi diproduksi sebagai pemasok kebutuhan kayu, tetapi diambil getahnya. Apalagi semakin tua pohon itu, semakin banyak getah yang dihasilkan. Sehingga kebutuhan kayu pasar harus segera dipenuhi dari jenis pohon yang lain. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul)²⁸, "*Sekarang pinus kalau apa-apa harus ada ijin, atau menebang dalam kapasitas besar maupun kecil*". Padahal kebutuhan kayu dunia semakin besar. Sedangkan, hutan-hutan produktif di Jawa hanya sedikit dari total keseluruhan hutan yang dikelola. Hutan produksi terbatas 23.398.154 hektar dan hutan produksi tetap 35.925.314 hektar. Dengan demikian hutan lindung yang luasnya 32.221.389 hektar hanya 23% dari luas kawasan hutan²⁹. Artinya, kemungkinan perluasan produksi kayu tidak dapat diandalkan dari luasan areal hutan negara yang tersedia. Untuk itulah tanaman albasia mempunyai peran ganda dalam menjawab persoalan tersebut, selain fungsinya sebagai pereduksi emisi carbon. Pilihan ini cukup logis secara ekonomis, karena masa pertumbuhannya yang relatif cepat. Albasia sudah bisa dipanen dalam jangka 4-5 tahun, tetapi terkadang petani memanennya berumur 2-3 tahun.

Albasia bagi petani setempat menjadi pilihan yang lebih menjajikan daripada jenis tanaman lain, seperti padi maupun glagah. Saya mendapatkan informasi

²⁵ Kasus longsor adalah satu satu bencana alam yang sering terjadi di daerah Watukumpul. Ada informasi kalau longsor ini pernah menimbulkan banyak korban, bahkan satu dusun pernah dipindah. Pada saat penelitian berlangsung, hampir tiap hari beberapa titik lereng terjadi longsor kecil yang mengganggu jalan.

²⁶ Lihat juga Roy Ellen, *ibid*: xxi-xxii. Dia menjelaskan kalau masing-masing bentuk produksi di pedesaan seperti peladangan berpindah, produksi tanaman yang langsung dijual, hasil perkebunan, aturan kontrak perusahaan pertanian, pekerja upahan dalam industri hasil hutan, semuanya ini, "dipengaruhi oleh akses pasar yang makin meningkat, introduksi teknologi baru, yang kadang-kadang disponsori oleh pemerintah, tetapi di pedalaman paling sering diadopsi atas dasar inisiatif setempat".

²⁷ Banyaknya bibit yang harus diganti ini ternyata bermacam-macam. Kasus di desa Bongas, petani yang menebang alba pemberian program Gerhan, diwajibkan mengganti dengan 10

bibit baru. Sedangkan di desa Wisnu dan sekitar kecamatan, petani diwajibkan untuk menggantinya dengan 5 bibit baru.

²⁸ SKAU ini merupakan semacam firma yang dimiliki pemilik penggergajian kayu bekerjasama dengan kehutanan, khususnya HPH untuk menangani kontrol penebangan kayu. Setiap sekali ijin pengangkutan, dikenakan biaya Rp 25.000/mobil/sehari. Di Watukumpul, terdapat 4 cabang SKAU.

²⁹ Diunduh dari <http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1622> pada tanggal 14 April 2012

menarik mengenai penjelasan seorang petani terhadap sepetak sawah di pinggiran hutan pinus. Suatu hari saya dengan pak J jalan-jalan ke sawah. Di depan, terlihat sepetak sawah dengan bekas potongan-potongan batang padi. Katanya, padi itu baru dipanen beberapa hari yang lalu. Luasnya sekitar 50x50 meter. Lahan seluas ini hanya mampu ditanami satu kilo, bahkan hanya mampu menghasilkan satu kuintal gabah. Akan tetapi kalau ditanami dengan albasia, ketika kutanyakan, lahan seluas itu bisa ditanami sekitar 20 batang. Kira-kira untung mana pak? “Sama aja”, jawabnya. Dia pun menjelaskan maksudnya sembari memberikan perhitungannya terhadap dua pilihan. Kalau ditanami padi, dalam jangka empat bulan mampu menghasilkan Rp 300.000/karung (\pm 50 Kg) dengan catatan itu musim panen. Sedangkan albasia baru akan bisa dipanen setelah berumur tiga tahun. Dengan harga per batangnya sekitar dua ratus ribu rupiah. Kalau ditimbang mungkin akan begini, dengan melihat waktu yang sama, artinya tiga tahun, maka hasil padi sama dengan $Rp\ 300.000 \times 4 \times 3 = Rp\ 3.600.000$. Sedangkan kalau albasia hasilnya $Rp\ 200.000 \times 20 = Rp\ 4.000.000$. Hitungan seperti ini masih kasar. Hasil tersebut belum dikurangi untuk modal pupuk dan tenaga intensif sejak penanaman hingga panen. Sedangkan, kalau dia menanam pohon, dia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga selama perawatan. Bahkan, dia dapat memanfaatkan rumput yang tumbuh di bawahnya untuk pakan ternak³⁰.

Masifnya penanaman tersebut juga didorong oleh meningkatnya pendidikan di dataran tinggi. Penduduk sekitar Watukumpul beberapa tahun belakangan, mulai sadar akan pendidikan bagi anaknya. Bahkan sekarang mulai muncul kesadaran orang tua untuk wajib menyekolahkan anaknya. Rasa ‘malu’ menjadi pertimbangan bagi mereka, jika anak tidak bisa merasakan bangku sekolah. ‘Malu’ juga dirasakan seorang anak tersebut jika ia setelah sekolah, menjadi orang terdidik, harus kembali mengolah lahan sawah tadah hujan orang tuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nicolaas Warouw dalam studinya mengenai pekerja di Tangerang³¹, introduksi terhadap gagasan tentang pembangunan pada gilirannya telah

memberikan beban pada anak-anak desa berupa sebuah citra mengenai dirinya yang menjadi bagian dari keterbelakangan kawasan pedesaan. Wacana pembangunan dalam banyak buku teks sekolah lebih banyak mengabadikan gambar jalan-jalan beraspal, gedung pencakar langit, kota yang tertata baik, pesawat terbang, dan pabrik beserta cerobong asapnya sebagai simbolisasi industrialisasi di Indonesia.

Beberapa orang yang berprofesi karena latar pendidikan, seperti PNS maupun guru, memilih untuk menanam sawahnya dengan albasia. Saya menemukan kasus, banyak orang tua yang tidak ingin mengantisipasi masa depan anak-anak mereka untuk tetap mendapatkan kehidupannya dari pertanian. Sehingga masuk akal jika mereka menginvestasikan keuntungannya untuk keperluan pendidikan dan gaya hidup perkotaan.

Faktor terakhir yang ikut mempercepat proses masuknya tanaman albasia adalah lewat organisasi pemuda setempat yang bernama BCL (Banowati Cinta Lingkungan). Organisasi ini bergerak di bidang konservasi lingkungan, yang lahir sebagai respon terhadap maraknya penggundulan hutan di gunung Banowati. Salah satu kegiatannya adalah kemah alam dan penanaman pohon. Keterlibatan LSM lokal ini cukup berpengaruh terhadap pengenalan kesadaran akan “indahya lingkungan yang hijau”. Kesadaran yang dikerangkai dalam bingkai konservasi hutan maupun penanaman tanaman keras.

Informasi-informasi tersebut semakin memperlihatkan adanya kontestasi kepentingan dalam pengelolaan ekologi di dataran tinggi. Kontestasi ini pada gilirannya turut mempengaruhi pembacaan petani maupun aktor lainnya dalam menentukan pilihan, orientasi, dan strategi pemanfaatan suatu peluang tertentu.

DAMPAK PENANAMAN ALBASIA TERHADAP SEKTOR AGRARIA PEDESAAN

Sebelum menelusuri dampak pergantian tanaman terhadap produksi pangan di Watukumpul, perlu diketahui terlebih dahulu seberapa banyak bantuan bibit pohon yang disumbangkan. Di bawah ini data jumlah pohon yang sempat dibagikan kepada masyarakat Desa Watukumpul selama dua tahun terakhir. Selain itu juga seberapa luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

³⁰ Catatan lapangan tanggal 30 Januari 2012

³¹ Makalah Disampaikan pada Seminar “Menentukan Lokasi Perjuangan Sosial Melalui Reformasi Pendidikan di Indonesia (Refleksi Kritis Gagasan ‘Field of Struggles’ Pierre Bordieu), 24 Maret 2008, diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Gadjah Mada. Paper ini merupakan penulisan ulang atas makalah penulis yang berjudul “Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah” disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei 2007 di Cisarua, Bogor.

Tabel 1. Jumlah Bantuan Bibit Pohon Selama Dua Tahun (2011-2012)

No.	Tahun	Tanaman	Asal	Jumlah	Jatah per KK
1	2010	Albasia	Provinsi	10.000	± 25
		Pinus, Surian, Kalitus	KBR I	60.000	± 50
2	2011	Albasia	KBR II	60.000	± 100-300
			BRI	3.000	± 25
			Instansi Kecamatan	7.500	
Jumlah				41.100	± 200-400

Sumber: Data diperoleh dari KBR Watukumpul dan wawancara

Tabel tersebut terdapat informasi mengenai seberapa besar bantuan yang diberikan beberapa instansi setempat terhadap masyarakat petani. Ternyata, selama tahun 2010-2011, seorang petani atau KK, mendapat bantuan bibit pohon sebanyak 200-500 batang. Setidaknya, rata-rata setiap petani mendapat jatah 300 batang selama dua tahun.

Secara sekilas, jumlah ini tidak terlalu banyak. Akan tetapi sangat signifikan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan keterangan salah satu informan, penanaman bibit albasia harus dilakukan dengan jarak 3x3 meter. Sehingga, setidaknya penanaman bibit pohon sejumlah 300 batang tiap keluarga akan membutuhkan lahan seluas 2.700 meter².

Tabel 2. Tingkat kepemilikan lahan di Watukumpul tahun 2012

Tingkat kepemilikan lahan ³²	Jumlah petani
1 : petani besar (> 1,0 hkt)	149 KK
2 : petani menengah (0,50-0,99 hkt)	473 KK
3 : petani kecil (0,25-0,49)	1.543 KK
4 : petani gurem (0,10-0,24)	1.338 KK
Jumlah	3.503 KK

Tabel 3. Kepemilikan tanah berdasarkan jenis lahan tahun 2012

No.	Jenis Lahan	Jumlah pemilik
1	Sawah	1.847 KK
2	Lahan Kering (Tegal)	662 KK
3	Sawah + Tegal	1.034 KK
Jumlah		3.503 KK

Distribusi tanah berdasarkan tingkat kepemilikan dan jenis lahan di atas, kalau digabungkan, maka setidaknya jumlah lahan yang diperlukan untuk penanaman pohon albasia, seluas ± 2.000-3.000 meter². Dalam penafsiran saya, terjadinya konversi lahan tanah pertanian untuk tanaman pohon lebih banyak terjadi pada petani kecil dan gurem. Pada dua kelas petani ini, mereka harus melakukan konversi

³²Kriteria ini dipinjam dari konsep distribusi kepemilikan tanah dari Amri Marzali, mengenai "Strategi Peisan Cikalang dalam Menghadap Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003

tanah sawah maupun tanah keringnya untuk penanaman albasia. Jelas, jumlah tersebut sangat besar dan cukup signifikan dalam melihat proses-proses konversi lahan padi maupun lahan kering yang sebelumnya ditanami glagal dan nilam, menjadi lahan tanaman albasia.

Dampak penanaman albasia tidak hanya sampai di sini saja. Ada informasi yang menarik dari data demografi desa setempat yang memperlihatkan beragamnya sektor pekerjaan masyarakat pada saat penelitian ini dilakukan, yakni tahun 2011. Berikut ragam persebaran jenis pekerjaan yang ada di Watukumpul.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan³³

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase	
1	Petani	Pemilik tanah	625	17,84 %
		Penggarap lahan	165	4,71 %
		Penggarap penyekap	664	18,95 %
		Buruh tani	637	18,18 %
		-	-	-
2	Nelayan	-	-	
3	Pengusaha sedang/besar	-	-	
4	Pengrajin./industri kecil	36	1,02 %	
5	Buruh	Industri	131	3,73 %
		Bangunan	495	14,13 %
		Pertambangan	-	-
	Perkebunan	-	-	
6	Pedagang	477	13,61 %	
7	Pengangkutan	48	1,37 %	
8	PNS	93	2,65 %	
9	Polri	3	0,08 %	
10	Pensiunan	86	2,45 %	
Jumlah		3.503	100 %	

Sumber : monografi Desa Watukumpul tahun 2012

Data di atas merupakan berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh warga desa Watukumpul pada tahun 2011. Tabel tersebut memperlihatkan beberapa informasi. Pertama, ternyata jumlah pemilik tanah di desa Watukumpul hanya sedikit, yakni 625 warga usia produktif dari 3.503 jiwa. Artinya warga yang masih mengolah lahan dan memperkerjakan buruh untuk pertanian sawah, hanya sekitar 17,84 %. Sedangkan di sektor buruh penyekap dan buruh tani masing-masing melebihi pemilik tanah, yaitu 18,95 % dan 18,18 %.

³³ Sumber dari Monografi Desa Watukumpul tahun 2011

Kedua, warga yang bekerja di sektor *non-farm* maupun *off-farm*³⁴, seperti: bangunan; industri; maupun perdagangan, terlihat cukup besar, 17,86 %. Informasi dari tabel tersebut adalah telah terjadi pengurangan jumlah warga yang bekerja di sektor pertanian, khususnya menggarap sawah atau tegal. Dengan demikian, maka penanaman albasia, atau program tanam pohon yang selama ini dijalankan berdampak pada dua hal, yakni konversi lahan dan orientasi jenis pekerjaan.

Berdasarkan keterangan dan hasil observasi, saya melihat mulai ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola keseharian petani. Masuknya tanaman baru ini, membuat waktu luang mereka menjadi semakin panjang. Di sini waktu luang merupakan hal yang juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Kalau sebelumnya, ketika penanaman padi masih besar, petani mempunyai tradisi ‘migrasi singkat’. Migrasi yang saya maksud di sini adalah migrasi dilakukan ketika se usai masa tanam sampai masa panen, sekitar 2-3 bulan. Dalam rentang waktu ini, kaum laki-laki memilih untuk pergi ke kota atau daerah lain untuk mencari pekerjaan, entah di bangunan, sopir, atau toko, dll. Sedangkan pengurusan sawahnya diserahkan kepada perempuan. Jika waktu 2-3 bulan saja membuat mereka harus mencari pekerjaan di kota, lantas bagaimana dengan tanaman albasia? Apa signifikansinya terhadap transformasi pedesaan dataran tinggi? Sub bab berikut akan dijelaskan lebih jauh

NEGOSIASI PETANI DAN ORIENTASI KERJA: DISKUSI DALAM KONTEKS KEPENDUDUKAN

Pendekatan Ekologi Politik telah memberikan banyak pemahaman baru mengenai situasi kependudukan dan ekologi di dataran tinggi Jawa, khususnya Watukumpul. Digunakannya pendekatan ini dikarenakan ada asumsi bahwa perubahan lingkungan tidak lepas dari peran politik-ekonomi negara; pengetahuan, strategi, dan keputusan penduduk setempat; serta pasar dan kapitalisme global. Sebagaimana Tania Li menjelaskan³⁵, proyek-proyek kebudayaan, ekonomi, dan politik, yang diikuti oleh masyarakat pedalaman--yaitu hal-hal yang mereka sendiri memang berusaha untuk mencapainya--

terbentuk melalui hubungannya dengan berbagai agenda hegemoni, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada hegemoni ini karena tidak ada satu bentuk hegemoni yang benar-benar dominan. Pada dasarnya masyarakat memiliki pemikiran dan alternatifnya sendiri. Ketiga faktor tersebut tidak berada dalam hubungan linear dimana lingkungan baru adalah hasilnya. Di sana ada proses dialektis cukup rumit antar ketiganya dalam waktu lama dan masing-masing mempunyai kuasa yang relatif sama berdasarkan posisi dan kelasnya.

Permasalahan mengenai kurang berkembangnya pertanian di daerah tropis, yang dalam pandangan Borgstrom (1973), disebabkan karena kurangnya ‘modal alami’ yang tersedia dari hasil eksploitasi jangka pendek. Hasil panen suatu tanaman pada saat tertentu, seharusnya sebagian besar dianggarkan untuk pembiayaan pengelolaan tanaman musim selanjutnya. Dalam tahun-tahun belakangan, telah mulai disadari oleh petani setempat, dengan lahirnya metode tumpang sari dan atau agrisilvikultur³⁶. Modal ini bisa diperoleh dengan mudah jika tanaman yang diproduksi dibutuhkan oleh pasar. Artinya petani harus menanam suatu tanaman tertentu yang lebih propektif terhadap pasar untuk memperbesar perolehan uang. Saya melihat, tanaman albasia menawarkan itu kepada penduduk setempat. Sehingga introduksi albasia mendorong perubahan ini menjadi lebih cepat.

Proses introduksi tanaman albasia di Watukumpul tidak dijalankan dengan paksaan, tetapi dengan pendekatan kultural. Bentuk introduksi ini terlihat melalui analogi pohon albasia dengan anak kecil yang bakal membahagiakan pemiliknya di kemudian hari. Bentuk lainnya adalah penekanan albasia sebagai makhluk bernyawa “*bakal ada urusannya dengan Tuhan*”, dalam bahasa informan. Selain itu, faktor perkembangan di dataran tinggi juga ikut merubah cara pandang masyarakat kaitannya dengan status dan pemahaman mengenai dunia pasar global.

Proses awal masifnya penanaman pohon di Watukumpul, dilakukan di tebing-tebing kritis dan daerah lahan kering. Proses ini terus berkembang ke areal persawahan, seperti yang terlihat di sepanjang jalan dari Watukumpul sampai ujung kecamatan, seperti desa Tundagan, Gapura, Pagilaran, maupun Bodas. Daerah tersebut berada di perbatasan dengan

³⁴ Mengenai konsep pembagian jenis pekerjaan ini, lihat Masri Singarimbun, “Penduduk dan Perubahan”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996. Kategori (1) merupakan pekerjaan pertanian, (2) pekerjaan luar pertanian (masih ada kaitannya dengan kegiatan pertanian), dan (3) pekerjaan bukan pertanian (tidak ada hubungannya dengan pertanian).

³⁵ Lihat Tania Li, *ibid.* 2002: 5.

³⁶ Agrisilvikultur adalah sistem agroforestri yang mengkombinasikan komponen kehutanan (atau tanaman berkayu/*woody plants*) dengan komponen pertanian (atau tanaman non-kayu). Tanaman berkayu dimaksudkan yang berdaur panjang (*tree crops*) dan tanaman non-kayu dari jenis tanaman semusim (*annual crops*).

wilayah Perhutani terdapat lautan albasia yang hampir siap panen. Begitu juga dengan daerah pinggir jalan, terdapat pohon-pohon albasia ditanam memenuhi petak sawah maupun hanya ditanam di pinggir sawah. Dalam waktu tidak relatif lama, daerah Watukumpul sudah terlihat hijau seperti pematang hutan albasia.



Foto: Wilayah pertanian Watukumpul yang telah mengalami pergantian tanaman

Foto di atas memberikan gambaran seperti apa yang saya maksudkan di atas. Foto ini diambil dari pinggir jalan Watukumpul-Majalangu. Di bagian atas terlihat hutan negara berkomoditas pinus, berdampingan dengan hutan kelola yang dikembangkan oleh LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) setempat. Di bagian bawah terlihat sawah berdekatan dengan kebun albasia dipadu dengan tanaman jagung dan pisang. Ekologi baru ini merupakan hasil dari interaksi dan modifikasi manusia secara selektif selama beberapa generasi dengan sengaja atau tidak. Dalam pandangan saya, ekspansi albasia ini akan terus berlanjut mengingat kampanye penanaman pohon sebagai bagian dari reduksi pemanasan global dan isu degradasi lingkungan lingkungan masih cukup ramai belakangan ini.

Perubahan ekologi melalui introduksi albasia tersebut telah mendorong adanya differensiasi sosial-ekonomi terutama sektor pekerjaan di pedesaan dataran tinggi Pematang. Sektor *non-farm* maupun sektor *off-farm* mulai banyak berkembang di pedesaan, sedangkan sektor *farm* sendiri mengalami penurunan, terutama pertanian dengan pengelolaan intensif seperti persawahan. Sektor *non-farm* yang berkembang adalah pengolahan kayu, sektor peternakan kambing, dan pengolahan sapu dari glagah yang ditumpangsarikan dengan albasia. Sedangkan sektor *off-farm* yang berkembang adalah pertukangan, buruh bangunan, dan perdagangan. Sektor-sektor ini membutuhkan mobilitas ke berbagai daerah.

Perubahan komoditas dalam situasi ekologis watukumpul tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap pola migrasi penduduk dataran tinggi, di luar rendahnya pemasukan dari pertanian (Manning, 2005) atau kemiskinan (Khotari, 2002; Ellis, 2003) akibat meningkatnya populasi pedesaan (Firman, 2015) maupun daya tarik perkotaan (Warouw, 1996; 2007) dan meningkatnya akses untuk memperoleh pekerjaan jangka panjang (Khoo, Platt, & Sukamdi, 2015). Rentang waktu yang diciptakan oleh model pertanian sawah hanya berlangsung ketika masa bera dan antara masa tanam dengan masa panen. Sedangkan, penanaman albasia dengan masa panen yang lama, membuat petani memiliki waktu luang yang relatif lebih lama. Sehingga, adanya waktu luang yang panjang ini, membuat mereka harus menyusun strategi untuk mengakses pekerjaan lain. Secara otomatis, peluang yang tersedia ialah di sektor *non-farm* dan *off-farm*.

Kasus petani di Watukumpul semasa pertanian sawah, mereka memanfaatkan waktu luang dua sampai tiga bulan untuk bekerja di kota sekitarnya, seperti: Pekalongan, Yogyakarta, Solo, bahkan sampai Jakarta. Selesai habis masa tunggu panen ini, mereka akan pulang dan kembali bekerja di Sawah. Cara ini sebagai strategi petani setempat mengatasi lahan terbatas dan hasil panen yang tidak mencukupi untuk konsumsi rumah tangga sampai masa tanam berikutnya.

Strategi yang berbeda dikembangkan petani Watukumpul ketika waktu luang dalam penanaman Albasia menjadi dua sampai empat tahun. Kesempatan ini membuka peluang untuk bermigrasi ke daerah yang jauh dengan peluang tabungan (*saving*) yang lebih besar dari penghasilan di perantaraan. Kasus petani-petani Watukumpul memilih untuk bermigrasi ke luar Jawa, seperti: Kalimantan Timur dan Barat, Batam, Papua, Sumatera, dan beberapa tempat di Malaysia. Dengan demikian, telah terjadi adanya perluasan migrasi orang-orang dataran tinggi ke dataran rendah, ke kota, sampai ke luar pulau.

Dorongan migrasi ini juga ditentukan adanya nilai 'prestise' yang di bawa oleh orang-orang yang sebelumnya pernah ke kota. Mereka kemudian pulang dan bercerita sambil memperlihatkan keberhasilannya bekerja di sana. Motor baru, mobil, HP, dan sebagainya adalah simbol bagi keberhasilan itu. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nico Warouw, besarnya arus migrasi ke perkotaan disebabkan karena desa semakin kehilangan daya tariknya akibat ditinggal oleh generasi mudanya, tenaga kerja potensial. Mereka yang sedemikian terobsesi terhadap kemajuan perkotaan beserta dengan

kehidupan dan gaya hidup yang dianggap menjadi representasi modernitas³⁷.

Nilai ‘prestise’ muncul karena adanya tingkat *saving* yang tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh di desa. Tingkat *saving* yang lebih tinggi ini menjadi pertimbangan baru bagi petani. Orientasi ini tidak saja merubah lahan pertanian menjadi lahan kayu keras, tetapi turut mentransformasi status petani menjadi buruh atau tenaga kerja. Sebagaimana disebutkan Manning³⁸, tingginya angka keterlibatan penduduk Jawa pada sektor pertanian hanya menghasilkan pendapatan yang rendah bagi tiap pelakunya. Akan tetapi Manning berpendapat, sektor pertanian di pedesaan Jawa mengalami kejenuhan dalam menampung tambahan angkatan kerja baru setiap tahun. Sementara, sektor non-pertanian pedesaan belum mampu menyerap tenaga kerja baru dalam pendapatan yang memadai, yang dalam bahasa Manning sebagai ekonomi tingkat rendah (*low level economy*).

Upah yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan di desa nilainya hanya sedikit. Meskipun mereka mulai diperbolehnya mengolah tanah Perhutani (hutan produksi), tetap saja aksesnya masih terbatas. Akses mengelola hutan yang dibuka Perhutani dengan tujuan sebagai bentuk ‘kerjasama’ dengan penduduk setempat untuk mengelola hutan³⁹. Diperbolehkannya petani menanam palawija, diharapkan petani tidak akan menebangi pinusnya karena dibawahnya ada tanamannya sendiri. Akses masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pendapatan tetap terbatas. Lahan-lahan yang bisa diolah petani hanya wilayah yang berdekatan dengan sawah atau kampung. Tentu saja luasan lahan tersebut bisa tidak terlalu luas untuk

sejumlah keluarga di Desa Watukumpul maupun sekitarnya. Di samping itu, berdasarkan kasus petani setempat, sektor pertanian tidak mengalami kejenuhan dan menampung angkatan kerja baru sebagaimana disebutkan Manning. Pengalaman petani setempat ketika mengolah lahan, justru kesusahan untuk mencari tenaga kerja. Minimnya ketersediaan tenaga-kerja disebabkan karena banyaknya pemuda merantau atau melanjutkan pendidikan di kota⁴⁰.

Berbicara mengenai akses petani terhadap lahan di dataran tinggi, akses tersebut tidak menyempit atau berkurang disebabkan adanya lonjakan angka kelahiran (faktor demografi). Dalam konteks ini, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan gerakan konservasi yang mendorong petani menanam tanaman kayu. Menyempitnya akses petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap semakin meningkatnya arus urbanisasi dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa. Dengan demikian, ada satu catatan penting, setiap pengembangan sumber ekonomi memunculkan beragam peluang yang setiap orang bebas untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih salah satu peluang bisa terjadi karena dikondisikan dan dibatasi melalui intervensi dari luar. Oleh karena itu, penyempitan akses petani terhadap lahan tidak sesederhana berkurangnya kepemilikan tanah, tetapi pengkondisian alih-fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras.

KESIMPULAN

Studi ini memberi gambaran yang lebih luas dalam kajian dinamika kependudukan sejalan dengan dinamika kebijakan pengelolaan dataran tinggi dan perekonomian masyarakat setempat. Dinamika akses petani di dataran tinggi terhadap tanah sebagai bagian paling penting dalam membangun tempat tinggal, ekonomi, hingga persoalan lain yang lebih luas. Dinamika akses terhadap tanah ini tidak hanya semakin menyempit atau berkurang disebabkan lonjakan angka kelahiran (faktor demografi) dari tahun ke tahun. Dalam konteks kajian di dataran tinggi Pemalang, menyempitnya akses tersebut terjadi melalui kebijakan dan gerakan konservasi yang mendorong petani menanam tanaman kayu.

³⁷ Nicolaas Warouw, Makalah Disampaikan pada Seminar “Menentukan Lokasi Perjuangan Sosial Melalui Reformasi Pendidikan di Indonesia (Refleksi Kritis Gagasan ‘Field of Struggles’ Pierre Bordieu), 24 Maret 2008, diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Universitas Gadjah Mada. Paper ini merupakan penulisan ulang atas makalah penulis yang berjudul “Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah” disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei 2007 di Cisarua, Bogor.

³⁸ 1987: 78-82 dalam Warouw, *Pemogokan Buruh: Studi Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa Barat*. Skripsi jurusan Antropologi UGM. 1996:30 Lihat juga Manning, 2005. *Migration in World History*. New York and London: Routledge

³⁹ Mengenai pembatasan akses masyarakat terhadap hutan di Indonesia dapat dilihat Herman Hidayat, et.al, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002

⁴⁰ Berkurangnya jumlah tenaga kerja di pedesaan semenjak pemerintahan Orde Baru, sebagaimana disebutkan oleh Nicolaas Warouw, didorong pertumbuhan industri manufaktur di perkotaan yang sifatnya *labour-intensive*.

Menyempitnya akses petani terhadap lahan pertanian produksi pangan, mendorong mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi non-pertanian di luar daerahnya sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap semakin meningkatnya arus urbanisasi dan atau migrasi dari dataran tinggi ke rendah, dari desa ke kota, atau dari Jawa ke Luar Jawa. Dengan demikian, ada satu catatan penting, setiap pengembangan sumber ekonomi memunculkan beragam peluang yang setiap orang bebas untuk memilih. Akan tetapi, pilihan untuk memilih salah satu peluang bisa terjadi karena dikondisikan dan dibatasi melalui intervensi dari luar. Oleh karena itu, penyempitan akses petani terhadap lahan tidak sesederhana berkurangnya kepemilikan tanah, tetapi pengkondisian alih-fungsi lahan dari tanaman pangan ke tanaman keras.

Suatu pertimbangan serius lain dari studi ini ialah introduksi albasia telah membawa perubahan terhadap produksi tanaman pangan di dataran tinggi. Saya berpendapat, produksi beras di dataran tinggi Watukumpul akan berkurang akibat adanya perluasan wilayah tanam pohon albasia sebagaimana beberapa perhitungan dari pak J di atas. Tentu saja permasalahan ini ikut berdampak terhadap isu swasembada beras Jawa Tengah yang dicanangkan gubernur dengan target surplus dua juta ton di tahun 2014. Melihat kondisi pertanian di dataran tinggi begitu 'suram', target yang dicanangkan pemerintah provinsi Jawa Tengah menjadi terkesan naif. Dengan demikian, pemerintah harus segera mengantisipasi atau merumuskan ulang kebijakan peningkatan swasembada pangan, konservasi ekologi, peningkatan sumber daya manusia, maupun pengelolaan migrasi dan tenaga kerja terintegrasi.

Pada Akhirnya, persoalan dinamika kependudukan menjadi sangat kompleks dan berkelindan. Untuk itu, tidak mudah untuk mereduksi fakta-fakta di lapangan ke dalam 'medan' studi yang bisa dikontrol secara sederhana. Misalnya, persoalan kependudukan hanya dipahami dalam kerangka kependudukan saja, begitu juga dengan dinamika sosial-budaya yang lain. Pengalaman di Watukumpul menunjukkan dinamika kependudukan bersinggungan dengan faktor ekologis, bentuk kebijakan ekonomi program penanaman pohon yang bersinggungan dengan program swasembada beras dengan areal sasaran yang berbarengan. Di sisi lain, kita perlu melihat kemampuan petani menanggapi intervensi dan perubahan ekologis tersebut. Pentingnya sisi ekologi terlihat dari jenis tanaman yang dikembangkan oleh petani ikut menentukan dan mencerminkan bagaimana strategi masyarakat dan model orientasi kerja. Ditanamnya albasia dan pohon jagung maupun beras, memungkinkan salah seorang

dari sebuah keluarga bisa merantau tanpa harus kehilangan pemasukan dari sektor pertanian atau perkebunan. Kayuan-kayuan mempunyai nilai tabungan (*saving*) yang cukup besar untuk masa depan, sedangkan tanaman jagung atau padi digunakan untuk kepentingan subsistensi sehari-hari yang ditopang dengan pendapatan dari pekerjaan di perantaraan.

Dengan demikian, persoalan pangan harus ditempatkan sebagai persoalan dampak signifikan terhadap persoalan migrasi dan ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan semakin kompleksnya persoalan mengenai kehidupan di dataran tinggi Jawa. Untuk itu, ke depan kita harus mencoba untuk melihat dinamika kependudukan bukan dari aspek demografis saja, melainkan dari beragam sisi. Sebab, perubahan sosial dapat terjadi dari dan dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2002. "Studi Mobilitas Penduduk: Antara Masa Lalu dan Masa Depan". Dalam Tukiran, dkk. *Mobilitas Penduduk Indonesia: Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Ahimsa Putra, Heddy Shri. 1994. *Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya. Masyarakat Indonesia*. LIPI Jakarta Tahun XX, No. 4
- Borgstrom, Georg. 1973. *The Food and The People Dilemma: The Man-Environment Systems in the Late Twentieth Century*. Massachusetts: Duxbury
- Bryant, Raimon L. dan Sinead Bailey. 1997. *Third Worlds Political Ecology*. London and New York: Routledge
- Ellis, Frank. 2003. "A Livelihoods Approach to Migration and Poverty Reduction", Naskah disampaikan oleh Department of International Development (DFID), hl: 1-21
- Firman, Tommy. 2015. "Demographic Patterns of Indonesia's Urbanization, 2000-2010: Continuity and Change at the Macro Level". Makalah diseminarkan dalam tema Pembangunan, Migrasi dan Kebijakan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Forsyth, Timothy. 2003. *Critical political ideologi: the politics of environmental science*. London and New York: Routledge
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, terjemahan Sayogyo. Jakarta: Bharata Karya Aksara

- de Haan, Arjan. 1999. "Livelihoods and poverty: The Role of Migration. A Critical Review of the Migration Literature", *Journal of Development Studies* 36(2): 1-47
- Hardesty, Donald L. 1977. *Ecological Anthropology*. Canada: John Wiley & Sons.
- Harian Kompas. 2006. "Malnutrisi, keteledoran sebuah bangsa"; 7 Oktober
- Harris, Marvin. 2008. "The Cultural Ecology of Indian's Sacred Cattle" dalam Michael Dove dan Carpenter, *Environmental Anthropology: A historical Reader*. Australia. Blackwell Publishing. hl:138-153
- Hidayat, Herman, John Haba, & Robert Siburian (eds). 2011. *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Jhamtani, Hira. 2008. "Putting Food First: Toward community-based food security system in Indonesia". Yogyakarta.: Insist Press
- Khoo, Choon Yen; Mara Platt, Sukamdi. 2015. *Pola dan Dampak Migrasi Pekerja di Kecamatan Sampung, Ponorogo*. Ringkasan hasil penelitian kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan National University of Singapore
- Khotari, Uma. 2002. "Migration and Chronic Poverty", Naskah disampaikan dalam presentasi Chronic Poverty Research Centre, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, *Working Paper* No. 16 (Maret)
- Li, Tania (eds). 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Li, Tania. 2007. Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resouce Politics and the Tribal Slot. Dalam Michael Dove dan Carpenter, *Environmental Anthropology: A historical Reader*. Australia. Blackwell Publishing. hl:339-362
- Manning, Patrick. 2005. *Migration in World History*. New York and London: Routledge
- Marzali, Amri. 2003. *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mubyarto. 1993. *Sejarah Penelitian Pedesaan: Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM dan Aditya Media
- Orlove, Benjamin S. 1980. *Ecological Anthropology* dalam *Annual Review of Anthropology*. IX, 235-37
- Peet, Richard, Paul Robbins, dan Michael J. Watts . 1996. *Global Political Ecology*. London and New York: Routledge.
- Potter, Lesley. "New transmigration 'paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan", dalam *Asia Pacific Viewpoint*, Vol. 53, No. 3, December 2012, hl: 272-287
- Priyono, C. Nugroho. 2002. "Hutan Pinus dan Hasil Air" (online) <http://www.scribd.com/doc/770715/Hutan-pinus-dan-hasil-air> (10 April 2012)
- Semedi, Pujo. 2006. Petungkriyono: Mitos Wilayah Terisolir. Dalam Ahimsa-Putra, Heddy Shri. *Esai-Esai Antropologi: Teori, Metodologi, dan Etnografi*. Yogyakarta: Jurusan Antropologi Budaya UGM bekerjasama dengan Kepel Press
- Singarimbun, Masri, dkk. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sirait, Martua. 2009. *Indigenous Peoples and Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan Indonesia*. Universiteit van Amsterdam bekerja sama dengan Cordaid Memisa
- Sumartana, et.al. 1996. *Kisah dari Kampung Halaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surono, S. 2007. "48 anak kekurangan gizi di Jawa Tengah meninggal dunia; *Indonesian Nutrition Network [online]*; diakses dari: <http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1126761128,15743>; (14 Juni 2012)
- Warouw, J. Nicolaas. 1996. *Pemogokan Buruh: Studi Kasus pada Suatu Komunitas Buruh Industri di kabupaten Tangerang, Jawa Barat*. Skripsi jurusan Antropologi UGM. 1996
- _____. 2007. *Tercerabutnya Peserta Didik dari Dunianya: Sebuah Pengalaman atas Penyeragaman Kurikulum Sekolah*. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional pada 13-15 Mei di Cisarua, Bogor.

